



Polda Usut Banyak Kasus Korupsi

Polda Usut Banyak Kasus Korupsi

21 TERSANGKA. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan membeberkan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang menyeret banyak tersangka di Mapolda Sulsel, Selasa, 12 November 2024.



ABD MAJID/FAJAR

MAKASSAR, FAJAR — Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan membeberkan perkembangan sejumlah kasus yang ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Masing-masing terkait kasus pekerjaan proyek fisik, perbankan, dan penyalahgunaan wewenang.

Yudhi, sapaannya mengatakan, ekpo-

👉 Baca Polda... Hlm 11

CS Scanned with CamScanner

Polda Usut Banyak Kasus Korupsi

👉 Lanjutan Halaman... 9

se kasus yang dilakukan tersebut berkaitan dengan implementasi delapan program prioritas yang tergabung dalam Asta Cita selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto. Di mana, salah satunya adalah dugaan korupsi pekerjaan fisik.

"Dalam kasus ini ada dua perkara yang ditangani, yaitu pembangunan jalan ruas Sabbang-Tallang, Luwu Utara, sepanjang 18 km pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulsel TA. 2020. Dan pembangunan Pasar Labukkang pada Dinas Perdagangan Parepare TA 2019," kata Yudhi saat menggelar press release di Mapolda Sulsel, Selasa, 12 November.

Dua perkara ini, dijelaskannya, dilakukan dengan modus operandi yang sama yaitu pinjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK tidak melakukan mengendalian kontrak, mengubah spesifikasi di lapangan, tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, dan penggunaan personal manajerial tidak sesuai dengan kontrak.

Mantan Kapolda Sulut ini memamparkan, kasus kedua adalah terkait masalah perbankan. Fasilitas kredit konstruksi pada Bank Sulselbar ke PT Aiwordeni Permai tahun 2020. Kemudian, fasilitas kredit konstruksi

dari Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang ke PT Delima Agung Utama tahun 2021.

"Ada juga pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi PT Bank Sulselbar Cabang Takalar ke PT Letebbe Putra Group tahun 2021-2022. Kemudian pemberian fasilitas KUR BRI Unit Mappasalle Cabang Pangkep tahun 2019-2021," beber Yudhi.

"Bukan hanya di bank tersebut, ada juga pemberian fasilitas KUR BRI Unit Takkalalla Kabupaten Soppeng tahun 2022-2023," sambung Yudhi.

Perkara lainnya, yaitu penyalahgunaan wewenang penduplikasian kartu debit milik nasabah pada BRI Kahu Kabupaten Bone tahun 2023.

"Terakhir, kasus pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri SME (Small Medium Enterprise/ usaha Kecil Menengah) Makassar Kartini ke Koperasi PT Eastern Pearl Flour Mills (EPFM) pada tahun 2018-2019," tegas Yudhi.

Modus operandi pada kasus perbankan tersebut dijelaskannya, adalah melakukan analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme, memberikan kredit di luar wilayah kerja cabang dan pembayaran termin yang tidak dibeberatkan.

Adapun kasus ketiga, kata Yudhi, adalah dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan. Di mana telah terjadi pung-

utan PPh 21 bagi PNS penerima pembayaran jasa pelayanan klaim BPJS di RSUD Lanto Dg Pasewang, Kabupaten Jeneponto tahun 2017-2018.

Lalu, ada juga pengadaaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 pada Dinas Sosial Makassar TA. 2020. Kemudian, pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD Pengelolaan Agribisnis Pertanian Maros tahun 2023.

"Modus operandi pada kasus itu, adalah melakukan pemotongan kepada tenaga kesehatan atas penerimaan jasa klaim BPJS namun tidak menyertakan PPh 21, tapi disimpan di rekening pribadi dengan memalsukan slip setoran klaim BPJS seolah-olah telah dibayar. Menjual dan menyewakan barang milik negara namun tidak disetorkan ke kas negara," terang Kapolda.

Dari keseluruhan kasus yang diekspose, Polda Sulsel sedikitnya mengamankan sebanyak 21 tersangka. Sedang saksi yang telah diperiksa ada 453 orang dan 12 ahli.

"Barang bukti yang diamankan dari kasus tersebut, berupa 350 dokumen (BPKB, sertifikat, dokumen lainnya), 14 kendaraan roda empat, 10 Unit Kendaraan Roda 10 Dum Truck, 8 Forklift truck, Hp dan tiga laptop serta uang tunai Rp

2.295.000.000," pungkaskan Yudhi.

Libatkan Mantan Kadis

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan, yaitu perkara Bansos Covid-19 Makassar tahun 2020, Ditreskrimsus Polda Sulsel ternyata menetapkan mantan kepala Dinas Sosial Makassar inisial MT sebagai tersangka.

"Untuk Bansos Covid-19 baru satu tersangka. Untuk tersangka ini kasusnya adalah pengadaan barang, jadi tersangka-nya mantan kadis," ujar Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Dedi Supriyadi di kesempatan yang sama saat mendampingi Kapolda.

"Sementara masih dalam tahap penghitungan kerugian negara, nanti setelah itu ada penetapan tersangka lainnya," sambung Yudhi.

Diberitakan sebelumnya, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar dalam kasus ini. Dalam kasus ini, diketahui ada kurang lebih 327 orang saksi yang diminta keterangan, termasuk diantaranya mantan Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb, mantan Kepala Dinas Sosial Makassar, MT yang saat ini ditetapkan tersangka, dan juga puluhan pegawai Bulog dan penyalur di lapangan. (maj/yuk)